

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA  
JATIREJO, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG**

Nyken Ayu Phytaloka Gayatri, Hardi Warsono, Slamet Santoso

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*ABSTRACT*

One of the principles of sustainable development is the concept of tourism village development. Through the Decree of the Mayor of Semarang Number: 556/819 concerning the Designation of Semarang City Tourist Villages, Jatirejo Tourist Village is one of the tourist villages in Semarang City which has quite promising potential for development. Development certainly involves the contribution of various stakeholders involved. This research aims to identify the role of stakeholders and analyze the inhibiting and driving factors in the development of the Jatirejo Tourism Village. This research uses a qualitative descriptive method with data collection through observation, interviews and documentation. The research results show that the roles of the stakeholders involved consist of primary stakeholders which include non-governmental organizations, local residents, and visitors/tourists and secondary stakeholders which consist of the government and academics. Supporting factors consist of values (individuals, organizations, policies and professionalism), communication, trust and policies, while inhibiting factors consist of lack of competence and participation of Pokdarwis members, lack of participation of Pokdarwis members and local residents, less than optimal marketing of tourism products. Recommendations that can be given are to increase the capacity of development and training activities, build accountability regarding the operation of the bureaucracy so that it is easy for local residents to understand, develop infrastructure, and develop communication media for the promotion of tourist villages.

**Keywords:** The Role of Stakeholders, Development of Tourism Villages

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk dalam negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan berbagai potensi diantaranya potensi alam, adat istiadat, budaya, hingga bahasa. Kelebihan tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata yang dapat menarik banyak wisatawan asing maupun domestik. Dengan meningkatnya daya tarik wisata, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pariwisata.

Pariwisata akan berkembang dengan baik jika dalam pengelolaannya dilakukan secara bijak. Memperhatikan kelestarian alam serta budaya disekitar potensi pariwisata sangat dibutuhkan dalam pengembangan pengelolaan pariwisata kedepannya. Kelestarian yang dimaksud yaitu keberlangsungan pariwisata yang memberikan dampak positif bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan lingkungan sekitar namun dengan memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Salah satu prinsip dari pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan desa wisata (UNEP dan WTO, 2005). Desa

wisata adalah tempat kepariwisataan dengan basis potensi pedesaan, segala keunikan serta daya tarik dari desa yang kemudian diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata (Sudibya, 2018). Konsep desa wisata saat ini tengah menjadi sorotan pemerintah Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memperkuat pemberdayaan desa melalui program desa wisata. Program ini menargetkan terbentuknya 2.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan lengkap. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, tentunya menjadi salah satu sasaran utama wisatawan untuk berkunjung. Beberapa daya tarik wisata yang ada di Kota Semarang diantaranya yaitu wisata buatan, budaya, alam, religi, wisata minat khusus, dan lain lain. Banyaknya potensi tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kawasan yang menarik untuk dikunjungi.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Kota Semarang Tahun 2019 - 2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik
2018	66.107	5.703.282
2019	82.000	7.200.000
2020	6.628	3.260.303
2021	30	2.400.000
2022	144.429	44.949.504

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (2018-2022)

Keberadaan desa wisata saat ini memiliki daya pikat yang potensial, didukung dengan banyaknya ragam tradisi dan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Prinsip utama yang dikembangkan oleh desa sendiri adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang sudah terjaga sejak lama dapat dilestarikan hingga saat ini.

Salah satu desa wisata yang memiliki potensi untuk berkembang yaitu Desa Wisata Jatirejo dengan letak wilayah di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Mengingat Desa Wisata Jatirejo merupakan salah satu pengrajin dan pengolah kolang-kaling terbesar di Kota Semarang, maka hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Desa Wisata Jatirejo. Desa Wisata Jatirejo telah ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 Tentang Penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata Jatirejo juga memiliki beragam potensi dengan memanfaatkan bentang alam yang ada. Salah satunya yaitu *river tubing*. Namun saat ini potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal. Daerah di sekitar Desa Wisata Jatirejo tersebut memiliki beragam wisata lain diantaranya yaitu Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Wonolopo, Waduk Jatibarang, Goa Kreo dan masih banyak lagi.

Beberapa potensi wisata tersebut merupakan tempat wisata yang telah berkembang lebih lama dibandingkan dengan Desa Wisata Jatirejo. Dengan demikian, Desa Wisata Jatirejo diharuskan untuk memiliki wisata penunjang agar dapat berkembang seperti wisata di sekitarnya. Berikut jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Jatirejo Gunungpati :

Tabel 2. Data Kunjungan Desa Wisata Jatirejo

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Kunjungan
1	2022	Desember	144
2	2023	Januari	130
3	2023	Februari	39

Sumber : Data Berbagai Sumber, 2023

Berdasarkan tabel 2 jumlah pengunjung pada bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 mengalami penurunan drastis. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, jumlah kunjungan paling tinggi ada di bulan Desember dengan jumlah 144 orang. Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata masih belum berjalan dengan optimal.

Untuk kembali meningkatkan kepariwisataan Desa Wisata Jatirejo, dibutuhkan peran dari stakeholders setempat dalam pengelolaan pengembangan desa wisata. Alonso (2015) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan erat hubungannya dengan keterlibatan *stakeholders* yang ada. Urgensi peningkatan peran stakeholders dalam upaya pengembangan pariwisata akan memberikan dampak jangka panjang baik dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial kultural. Melalui kontribusi melalui kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait maka diharapkan dapat membantu desa wisata mengatasi permasalahan yang ada dan mempercepat pengembangan desa wisata karena tiap *stakeholders* bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing (Paristha, dkk, 2022).

Desa Wisata Jatirejo dikelola secara swadaya oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dibawah pengawasan Dinas Pariwisata Kota Semarang. Hingga saat ini, pengelolaan masih dipegang secara mandiri oleh Pokdarwis. Selain Pokdarwis, keterlibatan pihak lain juga berpengaruh dalam pengelolaan Desa Wisata Jatirejo. Desa Wisata Jatirejo hingga kini telah membangun jejaring kerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya yaitu pemerintah daerah, kedinasan dan akademisi, selain itu dibutuhkan juga keterlibatan beberapa pihak internal diantaranya yaitu penduduk lokal dan lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi desa wisata dan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan penduduk lokal di Desa Wisata Jatirejo.

Latar belakang di atas kemudian menjadikan alasan mengapa penelitian mengenai “**Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang**” ini penting untuk dilakukan untuk kemudian dinilai mengapa *stakeholders* yang ada belum berjalan secara maksimal serta faktor yang mempengaruhinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo Gunungpati?
2. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat peran stakeholders dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran stakeholders yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati.
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran stakeholders yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Administrasi sebagaimana dimaksud oleh Herbert A. Simon yang dikutip oleh Syafiie (2006:13), "*administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*", yang berarti administrasi dijabarkan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Chandler dan Plano yang dikutip oleh Yeremias T. Keban (2014:13), administrasi disebutkan sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Dengan demikian,

administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

### **2. Manajemen Publik**

Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang mempelajari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama dalam mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini menjadi lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Keban (2008) menyebutkan bahwa dimensi manajemen berkaitan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk kemudian diimplementasikan sebagai suatu kebijakan publik. Fungsi manajemen publik seperti mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi masyarakat dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata merupakan salah satu implementasi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah.

### **3. Stakeholders**

Townsley (dalam Hidayah, dkk, 2019) mengklasifikasikan stakeholders menjadi dua kelompok diantaranya yaitu :

1. Stakeholders primer, yaitu stakeholders yang memiliki kepentingan langsung dengan sumber daya, baik sebagai mata pencaharian utama maupun terlibat dalam eksploitasi. Tiap stakeholders primer memiliki peran penting dan harus terlibat

dalam tiap kegiatan yang berlangsung dalam program.

2. Stakeholders sekunder, adalah tiap stakeholders yang memiliki minat atau kepentingan tidak secara langsung pada setiap bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya. Biasanya para stakeholders tidak dilibatkan secara langsung dalam tiap kegiatan yang terlaksana dalam program program yang berjalan.

Peran dan kepentingan masing masing stakeholders akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang berjalan dalam pengembangan desa wisata. Masing masing *stakeholders* memiliki peranan dan tanggung jawab yang berbeda. Peran *stakeholders* dibutuhkan untuk dapat mengetahui kondisi keterlibatan masing masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Nugroho (2015), dalam suatu pengelolaan kepariwisataan penjabaran peran *stakeholders* adalah sebagai berikut :

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), salah satu unsur pendukung tercapainya hasil pengembangan sektor pariwisata yang optimal. Beberapa peranan LSM diantaranya yaitu 1) terlibat atau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan potensi wisata, dan 2) membuka usaha pendukung kegiatan pariwisata.
- Konsumen (Pengunjung/Wisatawan), berperan sebagai pemberi *feedback* bagi

keberlangsungan pengalaman yang diberikan selama mengunjungi potensi wisata. Konsumen yang terlayani dengan baik juga dapat memberikan *willingness to pay* bagi upaya upaya konservasi di tempat dengan potensi wisata yang disajikan.

- Penduduk lokal, berperan sebagai subyek. Sebagai subyek, penduduk mengambil peran aktif dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan. Penduduk lokal juga berperan dengan turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang ada.
- Pemerintah, sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan suatu wilayah. Beberapa peranan pemerintah diantaranya yaitu 1) pemerintah sebagai fasilitator, dan 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Akademisi, berperan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan stakeholders masyarakat, swasta dan dunia internasional.

#### **4. Faktor Pendorong dan Penghambat**

##### **1. Nilai**

Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan, atau standar yang dipakai atau diterima oleh suatu individu, kelas, masyarakat dan lain lain. Indikator nilai meliputi nilai individu, nilai profesional, nilai organisasi, nilai legal, dan nilai kepentingan publik.

##### **2. Komunikasi**

Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan taraf keingintahuan seseorang tentang potensi wisata yang menjadi pokok pembahasan. Terdapat beberapa indikator yang menjadikan komunikasi dinilai sebagai komunikasi yang efektif menurut Sutardji (dalam Nuraeni, 2022), diantaranya yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan.

### 3. Kepercayaan

Kepercayaan dipupuk oleh rasa komitmen dengan berbagai informasi dan keahlian dalam mengkonsolidasi hubungan antara para pihak. Hubungan antar stakeholders harus terus diperhatikan agar kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan baik.

### 4. Kebijakan

Kebijakan pemerintah dijadikan sebagai landasan stakeholders dalam suatu pengembangan pariwisata (Judisseno dalam Ramadani, 2022). Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan agar pihak luar pemerintah memiliki pijakan dalam pengembangan pariwisata.

### 5. Pengembangan Desa Wisata

Agar manfaat wisata perdesaan dapat optimal dirasakan oleh masyarakat lokal, maka terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebagai konsep pengembangan desa wisata, yaitu: (1) berawal dan diinisiasi oleh masyarakat desa, (2) memiliki muatan lokal, (3)

memiliki komitmen bersama masyarakat untuk memajukan desa, (4) memiliki kelembagaan sebagai pengelola desa wisata, (5) adanya keterlibatan dan partisipasi warga desa, (6) adanya pendampingan dan pembinaan, (7) adanya motivasi yang kuat untuk memperbaiki kehidupan warga desa, (8) adanya kemitraan, (9) adanya forum komunikasi antar warga maupun dengan stakeholder yang lain, dan (10) adanya studi pengembangan desa wisata dan orientasi (Julianto, 2014).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu dengan mempertimbangkan informan yang akan dipilih sesuai dengan tujuan tertentu dan mengetahui dengan benang masalah yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo

Peran dan kepentingan antar stakeholders akan mempengaruhi hubungan kerjasama dalam pengelolaan wisata, baik dalam kebijakan, kesamaan

visi dan misi, tugas pokok dan fungsi (Laksono dalam Ardiansyah, 2021). Berdasarkan hasil identifikasi, ditentukan sepuluh stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo diantaranya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatirejo, Pokdarwis, Karang Taruna, Kelompok UMKM, Kelompok Tani Ternak (KTT), penduduk lokal Jatirejo, wisatawan atau pengunjung, dan pihak akademik/perguruan tinggi.

Terdapat dua pengelompokan stakeholders yang dipaparkan oleh Townsley (dalam Hidayah, dkk, 2019) diantaranya yaitu stakeholders primer dan stakeholders sekunder. Stakeholders primer merupakan stakeholders yang mempunyai hubungan langsung dengan keberlangsungan program atau terlibat langsung dalam proses keberhasilan program sedangkan stakeholders sekunder merupakan stakeholders yang tidak berhubungan langsung dengan suatu program.

Stakeholders yang termasuk dalam kelompok primer adalah lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari Pokdarwis Jati Langgeng, Karang Taruna Karya Jati Manunggal, dan kelompok tani, serta penduduk lokal. Sedangkan stakeholders sekunder terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Semarang, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatirejo dan konsumen.

## **1. Stakeholders Primer**

### **a. Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo diantaranya yaitu Pokdarwis, Karang Taruna, Kelompok UMKM, dan Kelompok Tani.

#### **- Terlibat/ikut berpartisipasi dalam pengelolaan potensi wisata**

Keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat dinilai masih belum optimal sehingga hanya diwakilkan sebagian orang saja.

#### **- Membuka usaha pendukung kegiatan pariwisata**

Lembaga swadaya masyarakat terlibat dalam membuka usaha pendukung terkait kepariwisataan melalui keberadaan kelompok UMKM.

### **b. Penduduk Lokal**

Penduduk berperan sebagai penerima manfaat bagi pengembangan kegiatan pariwisata yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup.



Partisipasi penduduk sangat dibutuhkan untuk mencapai peran tersebut.

Dalam memenuhi perannya tersebut, penduduk lokal Jatirejo dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan keikutsertaan penduduk sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan dan kemampuan dari masyarakat terkait.

## 2. Stakeholders Sekunder

### a. Pemerintah

Lembaga pemerintah yang turut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo diantaranya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dan pihak Kelurahan Jatirejo.

### - Fasilitator

peran pihak pemerintah sebagai fasilitator belum cukup optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini digambarkan melalui belum adanya sarana prasarana yang mumpuni di daerah Jatirejo. Sarana prasarana penunjang kepariwisataan merupakan salah satu aspek penting yang berguna untuk menarik minat para wisatawan untuk datang (Sulastri, 2017). Pemberian fasilitas yang mumpuni sudah menjadi

tanggung jawab bagi aspek pemerintah

### - **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Peran pihak pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah berjalan optimal dengan berbagai dampak positif yang diterima oleh masyarakat

### b. Akademisi

Peran dari pihak akademisi yaitu sebagai mendorong inovasi dan pengembangan produk dalam suatu kepariwisataan serta memberikan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan dinilai sudah optimal. Digambarkan oleh berbagai keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat sendiri. Hal ini diwujudkan dengan melalui berbagai pelatihan dan fasilitas yang diberikan.

### c. Konsumen

Peran dari konsumen atau wisatawan belum optimal dalam hal memberikan injeksi terkait perekonomian Desa Wisata Jatirejo. Ditunjukkan pada data tabel 2 kunjungan wisatawan Desa Wisata Jatirejo yang tidak mengalami peningkatan.

Selain itu dalam menjalankan perannya sebagai pemberi *feedback*, konsumen Desa

Wisata Jatirejo juga belum bisa diandalkan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan potensi wisata yang ada memang belum dapat disebarluaskan dan dikelola dengan sepenuhnya

## **B. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo**

### **1. Faktor Pendorong**

#### **a. Nilai**

Indikator nilai terdiri dari nilai individu, nilai organisasi, nilai legalitas dan nilai profesionalitas. Nilai individual yang menjadi faktor pendorong bagi peran stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo adalah peran *leadership* atau kepemimpinan dari Musfityati sebagai Lurah Jatirejo. Nilai organisasi yaitu nilai yang terkandung dalam kerjasama lembaga swadaya masyarakat dan pihak pemerintah dalam keberlangsungan pengembangan Desa Wisata Jatirejo. Nilai legalitas yaitu telah adanya kebijakan yang mengatur mengenai Desa Wisata Jatirejo yaitu Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/819 Tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang. Nilai profesionalitas yaitu dari tiap tiap individu yang

bergabung dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo.

#### **b. Komunikasi**

Aspek komunikasi yang hingga saat ini belum ada halangan menjadi salah satu aspek faktor pendorong bagi peran stakeholders yang terlibat dalam proses pengembangan Desa Wisata Jatirejo. Komunikasi antar stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo berjalan dengan optimal.

#### **c. Kepercayaan**

Kepercayaan antar stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo terdiri dari kehendak anggota organisasi untuk menyerahkan diri terhadap otoritas organisasi dengan harapan organisasi dapat mewujudkan harapan positif anggota organisasi. Kepercayaan yang ada tersebut memudahkan kegiatan kerjasama dan memberikan rasa aman bagi para anggota didalamnya.

#### **d. Kebijakan**

Telah adanya berbagai kebijakan yang menaungi baik pengembangan desa wisata itu sendiri serta Desa Wisata Jatirejo dan Pokdarwis Jati Langgeng menggambarkan bahwa pihak stakeholders yang terlibat di Desa Wisata Jatirejo dapat

menerapkan konsep pariwisata dengan leluasa.

#### **e. Potensi yang Melimpah**

Adanya potensi yang menjanjikan di Desa Wisata Jatirejo merupakan salah satu kekuatan karena dengan banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan maka banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk kedepannya.

### **2. Faktor Penghambat**

#### **a. Kurangnya Kompetensi Anggota**

Dalam keberlangsungannya pokdarwis belum dapat memenuhi segala kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota kelompok sadar wisata. Walaupun beberapa telah melakukan berbagai pelatihan yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang maupun Kelurahan Jatirejo, namun setelah dilakukan pelatihan, para anggota tidak meneruskannya ke forum, dalam artian tidak membagi ilmunya ke anggota lainnya.

#### **b. Kurangnya Partisipasi Anggota Pokdarwis dan Penduduk Lokal**

Pokdarwis Jati Langgeng terdiri dari total 37 anggota yang terdaftar dalam Profil Desa

Wisata Jatirejo (2021). Namun dalam setiap kegiatan, hanya sekitar 8-10 orang saja yang datang. Partisipasi masyarakat di Jatirejo sendiri belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan adanya kesibukan lain diluar mengikuti kegiatan kepariwisataan di Jatirejo.

#### **c. Kurang Optimalnya Pemasaran Produk Wisata**

Promosi pariwisata Desa Wisata Jatirejo masih menggunakan metode mulut ke mulut, hal ini tentu kurang optimal mengingat saat ini merupakan era digital. Sudah ada beberapa platform media sosial yang digunakan namun tidak aktifnya postingan membuat promosi tidak optimal dilakukan.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Peran Stakeholders**

a. Stakeholders primer yaitu terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan penduduk lokal. Stakeholders sekunder yaitu terdiri dari pemerintah, akademisi dan konsumen.

b. Dari beberapa stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo, terdapat diantaranya tidak menjalankan perannya dengan optimal. Dalam kelompok stakeholders primer yaitu lembaga swadaya masyarakat dan penduduk lokal. Sedangkan dalam kelompok stakeholders sekunder, pihak pemerintah dan konsumen.

## 2. Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong diantaranya yaitu aspek nilai yang terdiri dari nilai individual, nilai organisasi, nilai kebijakan dan nilai profesionalitas, lalu faktor komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan. Ditemukan faktor pendorong yang lain yaitu banyaknya tempat yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata di Jatirejo yang memungkinkan untuk dikembangkan dimasa depan.

Sedangkan semua faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo merupakan temuan baru diantaranya yaitu kurangnya kompetensi dari anggota pokdarwis, kurangnya partisipasi

anggota pokdarwis dan penduduk lokal, dan kurang optimalnya pemasaran produk wisata

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Menambah kapasitas kegiatan pelatihan terkait pengelolaan desa wisata dan melakukan *capacity building* terjadwal untuk meningkatkan kinerja organisasi pokdarwis. Penguatan pokdarwis dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penggerak. Selain itu pelatihan yang telah dilakukan harus diikuti dengan adanya monitoring rutin kepada anggota yang terlibat didalamnya.
2. Penyuluhan terpadu mengenai sadar wisata. Penyuluhan dilakukan dengan pelatihan mengenai pentingnya desa wisata dan cara mengembangkan desa wisata melalui produk lokal. Akses informasi bagi penduduk lokal dalam perencanaan pariwisata juga perlu disediakan.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak yang dapat mendatangkan

bantuan, seperti CSR perusahaan. Untuk dapat mendatangkan dana tentu dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

4. Mengembangkan aspek media komunikasi untuk meningkatkan promosi Desa Wisata Jatirejo dengan pembuatan media sosial lain yaitu twitter dan tiktok. Dalam hal ini pihak Pokdarwis dapat memberdayakan Karang Taruna. Mengoptimalkan paket wisata yang ada agar seluruh potensi wisata dapat berkembang secara optimal. Paket wisata yang ditawarkan dapat berupa paket wisata internal desa, misalnya paket wisata yang bergabung dengan Desa Wisata Kandri ataupun Waduk Jatibarang. Paket wisata yang ada juga dapat memberikan alternatif pilihan seperti paket wisata setengah hari, satu hari, atau lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Keban, Y. T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu (Ed.2, Cet.). (2008). Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, I (2019). EKOWISATA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

Sudibya, B. (1970). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.

<https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>

Destiana, Riska, Kismartini Kismartini, and Tri Yuningsih. 2020. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau 15 Penyengat Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 8.2: 132-153.

Nur, Y., & Sarwadi, A. (2021). Analisa Stakeholder dalam Program Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 90–104. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.8>

Paristha, N. P. T., Arida, I. N. S., & Bhaskara, G. I. (2022). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8, 625. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p13>

**Peraturan                      Perundang-  
Undangan**

Surat Keputusan Walikota  
Semarang No. 556/819 tahun  
2017 tentang Penetapan Desa  
Wisata Kota Semarang.